

Peraturan perundang-undangan untuk
Menjaga Keamanan Nasional
di
Wilayah Administrasi Khusus
Hong Kong



Daftar Isi

Bab I	8
Kebutuhan dan Urgensi	
Bab II	14
Keabsahan Undang-Undang Keamanan Nasional	
Bab III	20
Melestarikan “Satu Negara, Dua Sistem” untuk Stabilitas Jangka Panjang kita	
Bab IV	24
Perlindungan Hak dan Kebebasan yang Sah	
Bab V	30
Aturan Hukum dan Independensi Peradilan	
Bab VI	38
Dukungan Teguh dari Berbagai Sektor Komunitas Hong Kong pada Undang-Undang Keamanan Nasional	

Versi terjemahan hanya untuk referensi saja.

Dalam hal terjadi perbedaan antara versi terjemahan dan versi asli, versi asli yang berlaku.

慶祝香港回歸祖國二十周年



“ Untuk menegakkan dan melaksanakan prinsip “Satu Negara, Dua Sistem” memenuhi kepentingan rakyat Hong Kong, merespons perlunya menjaga kemakmuran dan stabilitas Hong Kong, melayani kepentingan dasar bangsa, dan memenuhi aspirasi bersama semua penduduk Tiongkok. Itulah sebabnya saya telah menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat akan secara teguh menerapkan kebijakan “Satu Negara, Dua Sistem” dan memastikan bahwa ini sepenuhnya diterapkan di Hong Kong tanpa dibelokkan atau disimpangkan. ”

*Disampaikan oleh H.E. Xi Jinping,
Presiden Republik Rakyat Tiongkok
pada Upacara Pelantikan Pemerintahan Periode Kelima
Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong (HKSAR) yang diadakan pada 1 Juli 2017*

周年大會暨香港特別行政







*Kekuatan Hong Kong di bawah
"Satu Negara, Dua Sistem":*

- Aturan hukum
- Independensi peradilan
- Pemerintah yang bersih
- Tingkat kejahatan rendah
- Pusat keuangan internasional
- Pusat bisnis dan penerbangan

“Setiap upaya untuk membahayakan kedaulatan dan keamanan Tiongkok, menentang kekuasaan Pemerintah Pusat dan kewenangan Undang-Undang Dasar HKSAR atau menggunakan Hong Kong untuk melakukan kegiatan infiltrasi dan sabotase melawan daratan adalah tindakan yang melewati garis batas, dan benar-benar tidak diizinkan.”

*Disampaikan oleh H.E. Xi Jinping,
Presiden Republik Rakyat Tiongkok
pada Upacara Pelantikan Pemerintahan Periode Kelima
Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong (HKSAR) yang diadakan pada 1 Juli 2017*

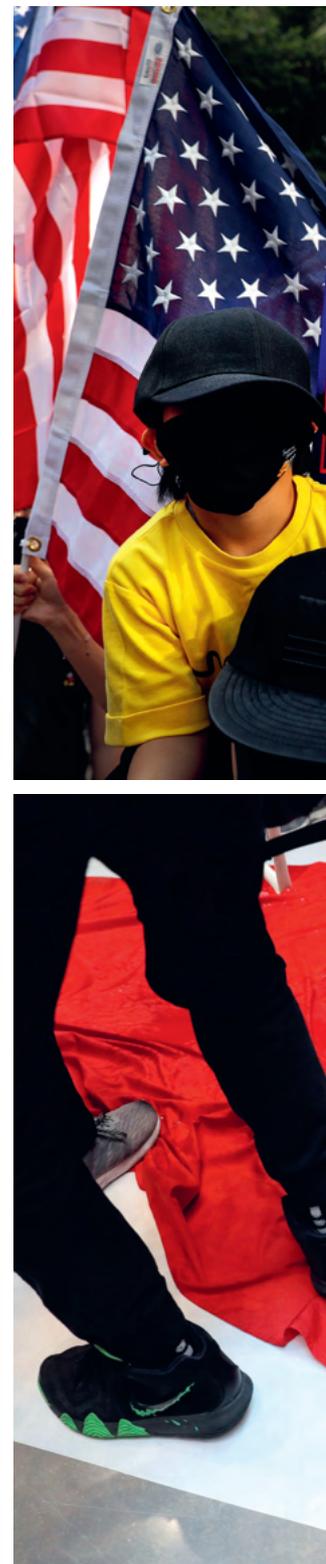






Bab I

Kebutuhan dan Urgensi





- Setiap negara memiliki hukum dan kewajiban untuk menjaga keamanan dan kedaulatan nasionalnya.
- Menghadapi ancaman yang semakin meningkat terhadap keamanan nasional di HKSAR sejak Juni 2019, dengan kekerasan oleh perusuh terus meluas.
- Kekuatan dan organisasi oposisi yang menganjurkan “kemerdekaan Hong Kong”, “penentuan nasib sendiri” dan “referendum” secara terang-terangan menentang otoritas dari Otoritas Pusat dan Pemerintah HKSAR.
- Elemen luar telah mengintensifkan campur tangan dalam urusan internal HKSAR.
- Kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan negara kita terancam secara serius, dan karenanya Otoritas Pusat tidak memiliki pilihan selain turun tangan dan mengambil tindakan.





- Undang-Undang Keamanan Nasional (NSL) diperlukan untuk menekan empat jenis tindak pidana, yaitu tindakan pemisahan diri, subversi kekuasaan negara, organisasi, dan perbuatan kegiatan teroris, dan kolusi dengan negara asing atau dengan elemen luar untuk membahayakan keamanan nasional.
- NSL dapat segera mengembalikan situasi kacau pada tahun lalu dan memulihkan stabilitas di HKSAR, sehingga dapat memperbaiki lingkungan bisnis dan investasi.





Bab II

Keabsahan Undang-Undang Keamanan Nasional

- NSL sepenuhnya konstitusional dan sah: sebagai organ tertinggi kekuasaan negara, Kongres Rakyat Nasional (NPC) menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya berdasarkan Konstitusi (yaitu hukum yang sah) dan dasar konstitusional yang tidak dapat disengketakan).
- Pasal 18(3) Undang-Undang Dasar HKSAR menetapkan bahwa Komite Tetap NPC (NPCSC) dapat menambahkan undang-undang nasional ke daftar undang-undang dalam Lampiran III Undang-Undang Dasar. NPCSC dapat menambah undang-undang nasional Lampiran III yang berkaitan dengan pertahanan dan urusan luar negeri dan juga hal-hal lain di luar otonomi HKSAR, dan menerapkannya di Hong Kong.
- Menjaga keamanan nasional melalui perundang-undangan yang sejalan dengan praktik internasional, dengan memperhatikan bahwa negara-negara Barat juga telah mengesahkan banyak undang-undang untuk melindungi keamanan nasional dan menetapkan badan pembuat keputusan dan badan penegak yang relevan.





- Pelanggaran serupa dengan empat jenis pelanggaran berdasarkan NSL dapat ditemukan di negara-negara barat.
- Beberapa hukuman mereka bahkan lebih keras, yang meliputi hukuman mati untuk pelanggaran terkait terorisme, sementara beberapa pelanggarannya juga memiliki efek ekstrateritorial.



國家安全



護我

Uphold National Security Safeguard C

全民國家安全教

NATIONAL SECURITY EDUCATI



Melestarikan “Satu Negara, Dua Sistem” untuk Stabilitas jangka panjang kita

- Pemerintah HKSAR memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan NSL. Kecuali dalam situasi tertentu yang langka, HKSAR akan menjalankan yurisdiksi atas kejahatan menurut Undang-Undang.
- Ketua Eksekutif HKSAR memimpin Komite untuk Menjaga Keamanan Nasional HKSAR, yang memikul tanggung jawab utama menjaga keamanan nasional di HKSAR.

家園

Our Home

育日
ON DAY







- NSL diberlakukan untuk memastikan pelaksanaan yang tegas, sepenuhnya, dan setia dari kebijakan “Satu Negara, Dua Sistem” di mana rakyat Hong Kong mengelola Hong Kong dengan tingkat otonomi tinggi.
- Kekuasaan kehakiman eksekutif, legislatif, dan independen, termasuk kekuasaan peradilan final, dari HKSAR tetap tidak terpengaruh.
- Kantor Penjaga Keamanan Nasional dari Pemerintah Rakyat Pusat (CPG) HKSAR hanya memiliki yurisdiksi dalam keadaan tertentu sesuai dengan NSL.

國家安全

National Security



中華人民共和國香港特別行政區
Hong Kong Special Administrative Region
of the People's Republic of China



法
Law



Bab IV

Perlindungan terhadap Hak dan Kebebasan yang Sah

- NSL dengan jelas menetapkan bahwa HKSAR harus melindungi hak dan kebebasan, termasuk kebebasan berbicara, pers, publikasi, berserikat, berkumpul, melakukan prosesi dan demonstrasi, yang disukai penduduk berdasarkan Undang-Undang Dasar, dan ketentuan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana diterapkan ke Hong Kong sesuai dengan Undang-Undang.
- NSL tidak mempengaruhi hak yang sah dari warga Hong Kong untuk menjalankan kebebasan berbicara, termasuk mengkritik kebijakan pemerintah atau kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat.





- Sebagai kota yang sangat internasional, Hong Kong sering mengadakan pertukaran dan memiliki hubungan dekat dengan negara, wilayah dan organisasi internasional terkait lainnya. Semua kegiatan pertukaran normal ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan hukum HKSAR.
- Berkunjung ke luar negeri untuk berbicara tentang situasi di Hong Kong, mengungkapkan pendapat tentang kota dan pertukaran informasi adalah kegiatan normal di mana NSL tidak memberlakukan batasan apa pun.









Bab V

Aturan Hukum dan Independensi Peradilan





- Menetapkan kerangka hukum untuk melindungi keamanan nasional tidak akan merusak atau menggantikan sistem hukum HKSAR yang ada, dan sistem peradilan kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar.
- NSL dengan jelas menetapkan bahwa prinsip penting aturan hukum harus dipatuhi, termasuk penghukuman dan hukuman sesuai dengan undang-undang, praduga tak bersalah, non bis in idem, dan perlindungan hak untuk membela diri dan hak-hak lain dalam proses peradilan yang menjadi hak tersangka tindak pidana, terdakwa, dan pihak lain dalam proses peradilan berdasarkan hukum.
- Tanpa dampak retrospektif: NSL berlaku hanya untuk tindakan yang dilakukan setelah mulai berlaku.





- Persidangan dilakukan di pengadilan terbuka, dan hanya dalam keadaan di mana persidangan melibatkan rahasia negara atau ketertiban umum dan sidang terbuka yang tidak pantas baik seluruhnya atau sebagian dari proses persidangan harus tertutup untuk media dan publik. Namun, putusan harus selalu disampaikan di pengadilan terbuka.
- Pasal 45 NSL juga menetapkan bahwa kasus keamanan nasional di bawah yurisdiksi HKSAR harus ditangani sesuai dengan prosedur peradilan yang ada.





- Menunjuk hakim tertentu untuk menangani kasus keamanan nasional tidak akan mempengaruhi independensi peradilan: ini sesuatu hal yang biasa di Hong Kong atau wilayah lain untuk menunjuk hakim tertentu untuk menangani kasus jenis tertentu.
- HKSAR memiliki yurisdiksi atas sebagian besar kasus. Keadaan luar biasa di mana Kantor Pengamanan Keamanan Nasional CPG di HKSAR melaksanakan yurisdiksi ditetapkan dengan jelas di NSL; dan Kantor dapat melaksanakan yurisdiksi atas suatu kasus hanya setelah disetujui oleh CPG atas permintaan yang diajukan oleh Pemerintah HKSAR atau oleh Kantor itu sendiri.





Bab VI

Dukungan Teguh dari Berbagai Sektor Komunitas Hong Kong pada Undang-Undang Keamanan Nasional

“ Meskipun ketegangan meningkat di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, saya tetap berharap bahwa, dengan keyakinan penuh dalam “Satu Negara, Dua Sistem” dan setelah penerapan peraturan perundang-undangan keamanan nasional, Hong Kong akan keluar dari badai politik sejak Juni lalu dan muncul lebih kuat dengan stabilitas yang dipulihkan. ”

*pesan video oleh Kepala Eksekutif HKSAR, Ny Carrie Lam
pada pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
(30 Juni 2020)*

“ Sebagai penduduk Hong Kong, kita menikmati perlindungan yang diberikan oleh negara, dan pada gilirannya memiliki kewajiban timbal balik untuk melindungi negara dengan mendukung pengenalan peraturan perundang-undangan yang melarang tindak pidana yang mengancam eksistensi negara. Oleh karena itu, kita mendukung undang-undang keamanan nasional yang akan beroperasi berdasarkan prinsip dari “Satu Negara, Dua Sistem,” untuk memastikan dengan lebih baik bahwa universitas dapat terus menciptakan pengetahuan melalui penelitian dan pembelajaran. ”

Ketua Dewan Universitas yang Didanai Komite Hibah Universitas

“ Hong Kong milik Tiongkok. Urusan Hong Kong adalah urusan internal Tiongkok. Langkah tepat waktu Otoritas Pusat untuk memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional dapat sepenuhnya membantu membawa masyarakat Hong Kong kembali ke jalur yang benar. ”

Tn CHENG Huan, SC

“ ini akan mengekang kegiatan jenis teror, memulihkan lingkungan yang damai, dan menciptakan lapangan kerja. Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik berlaku di Hong Kong, dan penduduk kita akan terus memanfaatkan sepenuhnya hak-hak yang dijaminnya, dengan cara hidup yang didukung oleh peradilan independen dan sistem hukum kelas dunia ”

*Tn Ian Grenville CROSS, SBS, SC
mantan Direktur Penuntut Umum*

“ Undang-Undang Keamanan Nasional dapat ditafsirkan sebagai “kontrak sosial baru” - tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat - yang diajukan oleh Otoritas Pusat untuk memastikan implementasi yang sukses dan berkelanjutan “Satu Negara, Dua Sistem”. Ini memberikan perumusan hukum yang jelas tentang "garis dasar" atau garis merah untuk elemen “Satu Negara” dari “Satu Negara, Dua Sistem”. Ini sama sekali tidak merusak martabat penduduk Hong Kong. ”

*Profesor Albert CHEN Hung-yee, SBS, JP
Departemen Hukum, Universitas Hong Kong*

“ Operasi bisnis normal usaha industri dan komersial di Hong Kong sama sekali tidak terpengaruh setelah berlalunya Undang-Undang Keamanan Nasional. Diyakini bahwa dengan detail aspek seperti penegakan hukum, penuntutan, peradilan, dan hukuman yang diatur dengan jelas dalam ketentuan, ini akan membantu menstabilkan situasi terkini, dan menjaga lingkungan usaha Hong Kong dan meningkatkan kepercayaan investor lokal dan asing dalam jangka panjang. ”

*Dr Jonathan CHOI Koon-shum, GBS, JP
Ketua, Kamar Dagang Umum Tiongkok*

“ Undang-undang Keamanan Nasional memungkinkan masyarakat untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban, membantu investor lokal dan asing meningkatkan kepercayaan dalam melakukan bisnis di Hong Kong, dan dalam jangka panjang, memperkuat dasar “Satu Negara, Dua Sistem”. ”

*Dr Dennis NG Wang-pun, BBS, MH
Presiden, Asosiasi Pabrik Tiongkok di Hong Kong*

“ Sektor manufaktur secara umum mendukung Undang-Undang Keamanan Nasional dan menganggap bahwa undang-undang tersebut akan menstabilkan lingkungan usaha. Sebelumnya, banyak investor asing memutuskan untuk menunda atau menghentikan pendirian kantor pusat regional mereka di Hong Kong di tengah ketidakstabilan dalam masyarakat kita, dan berencana untuk mengeksplorasi Pasar Daratan dan Asia Tenggara sebagai gantinya. Diyakini bahwa jika kita mencapai stabilitas sosial, investor asing akan kembali ke Hong Kong untuk investasi, membawa lebih banyak keuntungan daripada kerugian bagi Hong Kong dalam jangka panjang. Juga, status ekonomi Hong Kong secara keseluruhan tidak akan berubah. ”

*Dr Daniel YIP Chung-yin
Ketua, Federasi Industri Hong Kong*

“ Sektor industri dan komersial berharap implementasi Undang-Undang Keamanan Nasional dapat mengekang kekerasan dan membantu usaha kecil dan menengah membangun kembali usaha mereka. Mengingat sistem perdagangan bebas, rezim perpajakan rendah, sistem keuangan inti, dan perlindungan hukum untuk aset di Hong Kong, banyak perusahaan asing dengan kantor pusat Asia Pasifik mereka di sini tidak akan ingin meninggalkan tempat yang bagus seperti itu. ”

*Dr Eddy LI Sau-hung, GBS, JP
Presiden, Asosiasi Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong*

“ Menjadi bagian dari Tiongkok menjamin Hong Kong bisa mendapatkan keuntungan dari pasar besar yang terdiri dari 1.4 miliar orang. Lonjakan pencatatan di bursa efek kota tersebut baru-baru ini adalah bentuk mosi percaya. ”

*Dr the Hon Allan ZEMAN, GBM, GBS, JP
Ketua, Grup Lan Kwai Fong*

“ Aturan dan peraturan yang sama yang dikelola oleh Otoritas Keuangan Hong Kong sebelum pengenalan Undang-Undang Keamanan Nasional akan terus berlaku dengan cara yang sama. Sederhananya, ini seharusnya bisnis seperti biasa untuk operasi berkelanjutan lembaga keuangan kota kita. ”

*Tn Eddie YUE Wai-man, JP
Kepala Eksekutif, Otoritas Keuangan Hong Kong*

“ Dengan Amerika Serikat bereaksi terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional dengan sanksi, Hong Kong memang menghadapi lebih banyak tantangan. Tetapi justru ketika dunia melihat gesekan yang semakin meningkat, status perantara kita menjadi dan akan menjadi lebih berharga. Melihat secara global, prospek Hong Kong menarik. Bakat asing terus datang ke sini untuk berbisnis dan membangun karier, dan talenta lokal tetap kuat dan berkomitmen. ”

*Tn Laurence LI Lu-jen, SC, JP
Ketua Dewan Pengembangan Jasa Keuangan*

“ Pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional dengan suara bulat oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional menandai awal yang baru untuk Hong Kong. Stabilitas sosial sangat penting untuk pembangunan keuangan dan merupakan garis pertahanan penting untuk menjaga keamanan finansial negara kita dan Hong Kong. Peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan keamanan, memperkuat lingkungan investasi, dan meningkatkan kepercayaan dari investor. ”

*Tn Tim LUI Tim-leung, SBS, JP
Ketua, Komisi Sekuritas dan Berjangka*

“ Undang-undang Keamanan Nasional akan membentuk kembali Hong Kong sebagai lingkungan sosial yang aman dan stabil yang menarik masuknya investasi asing dan orang-orang profesional secara terus-menerus. Diyakini bahwa pemangku kepentingan dan lembaga di pasar keuangan akan mendukung undang-undang tersebut. Hong Kong harus memanfaatkan keunggulan uniknya berdasarkan prinsip "Satu Negara, Dua Sistem" untuk melayani perlunya pembangunan jangka panjang negara kita. ”

*Dr the Hon Moses CHENG Mo-chi, GBM, GBS, JP
Ketua, Otoritas Asuransi*

“ Apa yang dibatasi oleh Undang-Undang Keamanan Nasional adalah “kebebasan” untuk membahayakan keamanan nasional sebagian kecil orang; dan apa yang dilindunginya, antara lain, “kebebasan dari rasa takut” untuk semua warga Hong Kong. Diyakini bahwa dengan kasus-kasus yang dipertimbangkan oleh pengadilan, lebih banyak orang Hong Kong akan lebih diyakinkan. Ketentuan yang mengatur bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional tidak memiliki efek retrospektif juga menunjukkan otoritas Pusat menghormati tradisi hukum umum Hong Kong. ”

*Professor LAU Siu-kai, GBS, JP
Wakil Presiden, Asosiasi Tiongkok untuk Studi Hong Kong dan Makau*

“ Dengan bukti bantuan dan campur tangan asing yang tak terbantahkan ini, ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan kekuatan penuh Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru. ”

*Tn Tony Kwok Man-wai, SBS, IDS, JP
Ajun Profesor HKU Space dan
mantan Wakil Komisaris dan Kepala Operasi ICAC*

“ Setelah penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional, masyarakat Hong Kong secara keseluruhan, termasuk sektor industri dan komersial dan sektor inovasi dan teknologi, merasa bahwa Hong Kong sekarang menjadi tempat yang menyenangkan untuk tinggal dan bekerja. Banyak investor dan talenta asing tetap percaya diri di Hong Kong dan belum ada tanda-tanda brain drain (hengkangnya para ilmuwan dan cendekiawan). ”

*Dr Lee George LAM, BBS
Ketua, Hong Kong Cyberport Management Company Limited*

“ Lingkungan sosial yang stabil adalah prasyarat untuk penelitian dan pembangunan atau re-industrialisasi. ”

*Dr Sunny CHAI Ngai-chiu, BBS
Ketua, Hong Kong Science and Technology Parks Corporation*

“ Ambil Macao sebagai contoh, Undang-Undang Keamanan Nasional tidak akan mempengaruhi kebebasan beragama. Sheng Kung Hui mungkin terus mengadakan ibadah, kelas Alkitab, pertemuan doa, dll. ”

*Pastor yang Terhormat Dr Paul KWONG, GBS
Hong Kong Sheng Kung Hui*

“ Undang-Undang Keamanan Nasional dapat secara efektif menciptakan lingkungan investasi, usaha, dan social yang stabil dan teratur, melindungi kepentingan masyarakat umum, dan menjaga stabilitas Hong Kong. Undang-Undang ini merupakan landasan penting bagi praktik yang lancar dan sukses dalam jangka panjang "Satu Negara, Dua Sistem", serta premis untuk perkembangan agama Buddha yang sehat di Hong Kong. ”

Biara Po Lin Hong Kong





